

PENGARUH OTONOMI DAERAH DAN EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN TERHADAP KUALITAS ANGGARAN DESA DI CIBODASARI KOTA TANGERANG TAHUN 2020 - 2024

Devi Liana Wati¹, Vivi Oktari²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka

¹devihdo@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pelaksanaan otonomi daerah dan efektivitas pembangunan terhadap kualitas anggaran desa di Cibodasari, Kota Tangerang, selama periode 2020 sampai dengan 2024. Penggunaan pendekatan kuantitatif disertai dengan metode deskriptif dilakukan untuk menganalisis hubungan antar variabel. Laporan realisasi anggaran (LRA) dan laporan capaian pembangunan tahunan menjadi sumber data, untuk melakukan analisis, menggunakan alat analisis SPSS versi 25 dengan metode regresi linier berganda. Hasil analisis membuktikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kualitas anggaran, dengan koefisien regresi sebesar 6,25 dan nilai signifikansi 0,017, begitu pula dengan efektivitas pembangunan dengan koefisien sebesar 0,22 dan signifikansi 0,021. Secara simultan, kedua variabel bebas tersebut berkontribusi besar terhadap variasi kualitas anggaran, dengan nilai determinasi mencapai 91,3%. Dengan kata lain, semakin optimal pelaksanaan otonomi dan efektivitas pembangunan, semakin baik pula kualitas anggaran desa yang dihasilkan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa, sistem pengawasan yang efektif, serta konsistensi regulasi untuk mendukung perbaikan pengelolaan anggaran di tingkat desa.

Kata kunci: Otonomi daerah, Kualitas anggaran, Efektivitas pembangunan, Desa Cibodasari.

Article History

Received: June 2025

Reviewed: June 2025

Published: June 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia dimulai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kebijakan ini bertujuan agar pemerintah daerah lebih banyak kebebasan untuk mengelola keuangan dan sumber daya, termasuk mengatur anggaran desa secara mandiri. Otonomi daerah diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Mardiasmo, 2018).

Pelaksanaan otonomi daerah di beberapa wilayah, termasuk Kota Tangerang, masih mengalami beberapa hambatan. Permasalahan utama yang terjadi adalah terkait efektivitas penyerapan anggaran desa. Penyerapan anggaran yang baik sangat dibutuhkan untuk mewujudkan program pembangunan desa sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Namun masalah seperti rendahnya penyerapan anggaran,

keterlambatan pelaksanaan kegiatan, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa masih ditemukan (Sihombing, 2020).

Beberapa hal yang menjadi penyebab rendahnya kualitas anggaran desa antara lain adalah kemampuan kapasitas perangkat desa dalam merencanakan dan mengelola keuangan yang terbatas, sistem pengawasan internal yang lemah, serta adanya intervensi dari pihak eksternal yang dapat menghambat proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Selain itu, perubahan regulasi yang sering terjadi juga menambah kompleksitas dalam pengelolaan anggaran desa. Dalam konteks otonomi daerah, desa seharusnya mendapatkan kebebasan dalam menggunakan anggarannya, akan tetapi kenyataannya masih terdapat banyak kendala struktural dan kultural yang membatasi efektivitas otonomi tersebut (Sulistiyowati, 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya antara lain penelitian Sihombing (2020) yang membuktikan bahwa otonomi daerah berdampak positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa, walaupun masalah sumber daya manusia masih ada. Penelitian Sulistiyowati (2021) juga menjelaskan bahwa kemajuan kualitas anggaran desa sangat tergantung pada kapasitas aparatur dan sistem pengawasan internal. Selain itu, Bastian (2019) mengatakan bahwa besarnya peran transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas penggunaan dana desa.

Pemerintah pusat telah menambahkan anggaran dana desa dalam beberapa tahun terakhir ini sebagai komitmen pemerintahan menuju pembangunan dari bawah ke atas. Desa Cibodasari di Kota Tangerang termasuk salah satu desa yang mendapatkan dana dari pemerintah pusat maupun daerah. Namun kenyataan menunjukkan bahwa tingkat kualitas anggaran desa di Cibodasari Kota Tangerang masih belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan banyaknya anggaran yang tidak terserap secara maksimal dan realisasi kegiatan yang tidak sesuai rencana awal. Oleh karena itu, peneliti mencoba mengkaji dua hal utama: pertama, apakah pelaksanaan otonomi daerah berpengaruh terhadap kualitas anggaran desa di Cibodasari Kota Tangerang Tahun 2020 sampai dengan 2024, kedua, apakah efektivitas pembangunan berpengaruh terhadap kualitas anggaran desa di Cibodasari Kota Tangerang Tahun 2020 sampai dengan 2024. Penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana otonomi daerah mampu mengatasi hambatan tersebut dan mendorong efektivitas penggunaan anggaran.

Rumusan Masalah

1. Apakah pelaksanaan otonomi daerah berpengaruh terhadap kualitas anggaran desa di Cibodasari Kota Tangerang Tahun 2020-2024?
2. Apakah efektivitas pembangunan berpengaruh terhadap kualitas anggaran di Desa Cibodasari Tahun 2020-2024?
3. Apakah pelaksanaan otonomi daerah dan efektivitas pembangunan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas anggaran di Desa Cibodasari Tahun 2020 - 2024?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan otonomi daerah terhadap kualitas anggaran desa di Cibodasari Tahun 2020 - 2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pembangunan terhadap kualitas anggaran desa di Cibodasari Tahun 2020 - 2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh simultan antara otonomi daerah dan efektivitas pembangunan terhadap kualitas anggaran desa di Cibodasari Tahun 2020 - 2024.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang sektor publik, tata kelola keuangan daerah, desentralisasi, dan akuntabilitas. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada seberapa efektif kualitas anggaran publik dan otonomi daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah Kota Tangerang

Penelitian ini menunjukkan gambaran mengenai seberapa besar pelaksanaan otonomi daerah mempengaruhi kinerja keuangan di tingkat desa, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas anggaran di Kota Tangerang.

b. Bagi Desa Cibodasari

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi internal untuk memperbaiki sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran agar lebih efektif dan efisien.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi akademis dan praktis untuk mahasiswa, khususnya yang mengambil studi di bidang akuntansi sektor publik, ilmu pemerintahan, dan kebijakan publik, sebagai dasar untuk memahami pelaksanaan otonomi daerah dan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan anggaran ditingkat desa. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk karya ilmiah terkait lainnya.

LANDASAN TEORI

1. Otonomi Daerah

Penelitian ini berdasarkan pada teori Smith (2008) tentang otonomi daerah, yang mendefinisikan bahwa otonomi daerah sebagai hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masalah pemerintahan dan kepentingan masyarakat secara mandiri. Teori pengelolaan keuangan publik Mardiasmo (2018) juga digunakan untuk melihat bagaimana anggaran desa diserap, Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran.

Pada dasarnya, otonomi daerah adalah penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memberikan hak kepada daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kemampuan dan karakteristik daerah itu sendiri. Sutedi (2015) menyatakan bahwa tujuan pokok otonomi daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan serta mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik. Dengan menekankan pentingnya desentralisasi dalam manajemen sumber daya dan keuangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan lebih banyak otonomi kepada pemerintah daerah. Dampaknya desa, sebagai pemerintahan tingkat bawah, memiliki otoritas penuh untuk merencanakan, menerapkan, dan menilai pembangunan di wilayah mereka.

2. Efektivitas Pembangunan

Efektivitas pembangunan diukur dari pencapaian sasaran dan tujuan sesuai perencanaan, dengan mempertimbangkan hasil dan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks anggaran desa, efektivitas dilihat dari kesesuaian antara program yang direncanakan dengan realisasinya serta dampak nyata bagi masyarakat. Mardiasmo (2018) mengatakan bahwa efektivitas sebagai prinsip pengeluaran anggaran, di mana setiap dana harus menghasilkan manfaat maksimal dan sesuai sasaran. Pembangunan yang efektif ditandai dengan penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur desa. Oleh karena itu, penelitian ini mendefinisikan bahwa efektivitas pembangunan sebagai kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan

program pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat, menggunakan anggaran secara bijak, dan menghasilkan manfaat dalam jangka waktu tertentu.

3. Kualitas Anggaran

Kualitas anggaran desa dapat dinilai melalui perbandingan antara realisasi anggaran dengan total anggaran yang dialokasikan, dan hubungannya dengan target pembangunan yang telah direncanakan. Lestari & Maulana (2020) mengatakan bahwa kualitas anggaran bukan hanya dilihat dari sisi kuantitas, tetapi juga dari segi efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Rendahnya kualitas anggaran biasanya disebabkan oleh permasalahan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban.

4. Studi Penelitian Sebelumnya

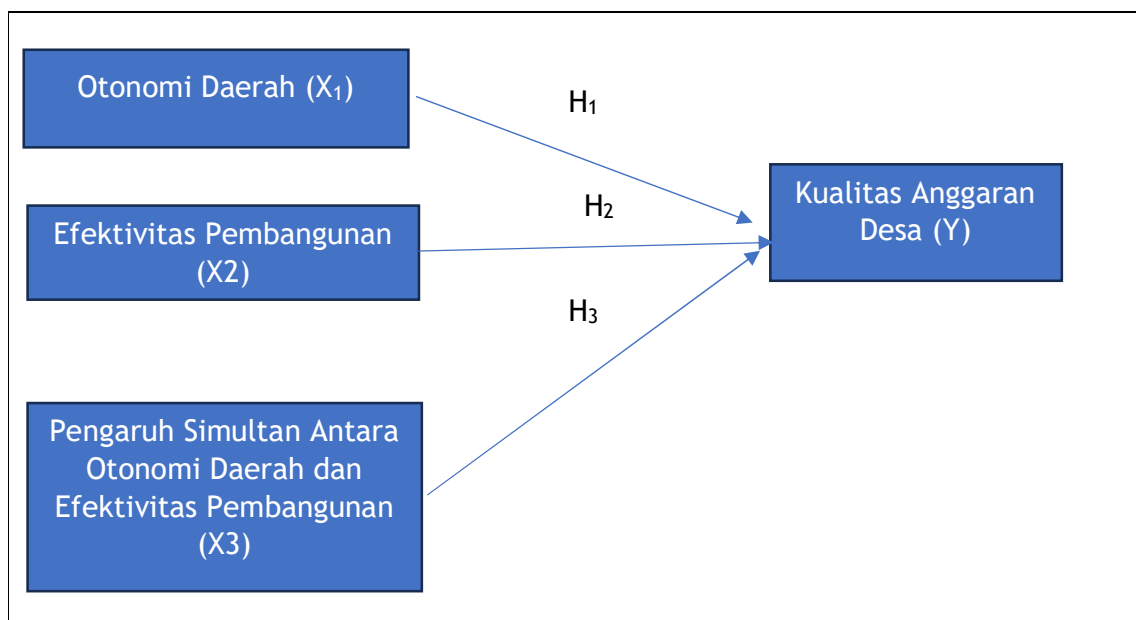
Penelitian sebelumnya (Sihombing, 2020; Bastian, 2019; Sulistiyowati, 2021; Sari, 2018) menunjukkan bahwa meskipun otonomi daerah memberikan ruang lebih besar bagi desa, kualitas anggaran tetap dipengaruhi oleh kapasitas aparatur, perubahan regulasi, intervensi eksternal, sistem pengawasan internal, kompetensi SDM, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Penguatan pengawasan internal dan peningkatan kompetensi SDM menjadi kunci optimalisasi kualitas anggaran. Perubahan regulasi yang sering terjadi juga menyebabkan kebingungan. Transparansi dan partisipasi masyarakat sangat berperan dalam meningkatkan efektivitas anggaran.

Kerangka Pemikiran

Otonomi daerah memberikan kekuasaan kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengelola masalah masyarakat, termasuk pengelolaan anggaran. Dengan otonomi yang lebih luas, desa diharapkan dapat merancang dan melaksanakan anggaran secara transparan, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Otonomi daerah menjadi unsur utama yang mempengaruhi kualitas anggaran desa. Efektivitas pembangunan juga menjadi indikator penting dalam menilai penggunaan anggaran secara maksimal, karena mencerminkan keberhasilan program desa dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, sekaligus menunjukkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Berikut ini adalah garis besar gagasan yang digunakan dalam penelitian ini:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁: Ada pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan otonomi daerah dan kualitas anggaran desa di Cibodasari Kota Tangerang Tahun 2020-2024.
- H₂: Ada pengaruh yang signifikan antara efektivitas pembangunan dan kualitas anggaran desa di Cibodasari Kota Tangerang Tahun 2020-2024.
- H₃: Ada pengaruh yang signifikan secara bersamaan antara pelaksanaan otonomi daerah dan kualitas anggaran desa di Cibodasari Kota Tangerang Tahun 2020-2024.

Dengan demikian, semakin baik pelaksanaan otonomi daerah dan efektivitas pembangunan maka semakin tinggi pula kualitas anggaran desa, asalkan didukung oleh aparatur yang kompeten, sistem pengawasan yang memadai, regulasi yang stabil, serta partisipasi masyarakat yang aktif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan deskriptif. Metode ini dipakai untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana otonomi daerah dan kualitas anggaran di tingkat desa diterapkan. Hal ini dilakukan dengan melakukan peninjauan menyeluruh terhadap dokumen resmi dan penelitian ilmiah. Data ini berasal dari laporan realisasi anggaran (LRA) dan laporan capaian pembangunan Desa di Cibodasari pada Tahun 2020 sampai dengan 2024, yang disusun dalam urutan waktu selama 4 tahun. Analisis dilakukan menggunakan alat analisis SPSS Versi 25 , yang mencakup uji regresi berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Data yang digunakan ini berasal dari LRA (Laporan Realisasi Anggaran) dan laporan capaian pembangunan Desa di Cibodasari Tahun 2020-2024. Variabel yang diteliti meliputi :

- X₁ (Pelaksanaan Otonomi Daerah): Diukur dari skor kewenangan pengelolaan keuangan desa (skala 1-2).
- X₂ (Efektivitas Pembangunan): Presentase program pembangunan yang selesai tepat waktu.
- Y (Kualitas Anggaran): Persentase penyerapan anggaran tahunan.

Indikator Operasional Variabel

Variabel Utama	Indikator	Skala Pengukuran	Sumber Data
X ₁ : Otonomi Daerah	1. Kewenangan pengelolaan keuangan desa	Skala ordinal 1-2 (rendah-tinggi)	Dokumen APBDes dan SK Kepala Desa
	2. Kemandirian dalam perencanaan anggaran		
	3. Implementasi keputusan lokal		
X ₂ : Efektivitas Pembangunan	1. Persentase program pembangunan selesai tepat waktu	Persentase (%)	Laporan pembangunan desa
	2. Realisasi fisik kegiatan		
	3. Kepuasan masyarakat		
Y: Kualitas Anggaran	1. Persentase serapan anggaran tahunan	Persentase (%)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
	2. Konsistensi antara RKPDes dan realisasi		

Tabel 1. Indikator Operasional Variabel

Laporan Realisasi Anggaran dan Capaian Pembangunan

Tahun	Otonomi Daerah (X_1)	Efektivitas Pembangunan (X_2)	Kualitas Anggaran (Y)
2020	1.0	70%	74%
2021	1.2	75%	75%
2022	1.3	77%	76%
2023	1.6	93%	90%
2024	1.8	87%	88%

Tabel 2. Persentase kualitas anggaran dan capaian pembangunan

Uji Normalitas

Metode Uji	Variabel	Statistik	Sig.
Shapiro - Wilk	Otonomi Daerah (X_1)	0.971	0.883
	Efektivitas Pembangunan (X_2)	0.938	0.609
	Kualitas Anggaran (Y)	0.931	0.558

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Shapiro - Wilk

Hasil pengujian normalitas Shapiro-Wilk menunjukkan distribusi normal data residual dengan histogram yang menunjukkan sebaran acak dan simetris. Data residual berdistribusi normal, menurut nilai signifikansi (Sig.) lebih dari 0,05.

Uji Multikolinearitas

Variable	VIF
Konstanta	106.73
Otonomi Daerah (X_1)	1.22
Efektivitas Pembangunan (X_2)	1.22

Tabel 4. Hasil analisis Uji Multikolinearitas

Dalam model ini, tidak ada multikolinearitas antara variabel independen, karena nilai VIF untuk Otonomi Daerah dan Efektivitas Pembangunan keduanya kurang dari 10.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error
1	0.956	0.913	0.826	2.38

Tabel 5. Hasil analisis SPSS

Dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0.826, maka menunjukkan bahwa variabel otonomi daerah dan efektivitas pembangunan berkontribusi 82,6% terhadap variasi kualitas anggaran desa.

Anova

Model	Sum Of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	170.75	2	85.375	15.02	0.012
Residual	16.25	2	8.125		
Total	187.0	4			

Tabel 6. Hasil Analisis SPSS

Dengan nilai F 15.02 dan p-value $0.012 < 0.05$, model regresi berganda simultan signifikan.

Koefisien

Variabel	B	Std. Error	t	Sig.
(Konstant)	48,1	2,88	1,67	0,000
Otonomi Daerah (X_1)	6,25	1,5	4,17	0,017
Efektivitas Pembangunan (X_2)	0,22	0,05	4,4	0,021

Tabel 7. Hasil analisis SPSS

- Nilai konstanta berarti jika variabel Otonomi Daerah dan Efektivitas Pembangunan = 0, maka nilai variabel dependen (Kualitas Anggaran) adalah 48,1.
- Koefisien B_1 adalah 6,25, yang artinya bahwa setiap peningkatan 1 satuan pada Otonomi Daerah akan meningkatkan kualitas anggaran sebesar 6,25 satuan, dengan variabel lain tetap konstan.
- Koefisien B_2 adalah 0,22, yang artinya bahwa setiap peningkatan 1 satuan pada Efektivitas Pembangunan akan meningkatkan kualitas anggaran sebesar 0,22 satuan, sementara variabel lain tetap konstan.

Model Regresi Linear Berganda

$$Y = 48,1 + 6,25 X_1 + 0,22 X_2$$

Dimana:

Y = Kualitas Anggaran

A = Konstanta

X₁ = Otonomi Daerah

X₂ = Efektivitas Pembangunan

Analisis Hasil Penelitian**Pengaruh Otonomi Daerah terhadap Kualitas Anggaran Desa**

Berdasarkan hasil analisis regresi, koefisien variabel Otonomi Daerah (X₁) sebesar 6.25 dengan signifikansi 0.017 (< 0.05) menunjukkan bahwa otonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas anggaran di Desa Cibodasari. Hal ini sesuai dengan teori Smith (2008) bahwa otonomi daerah bisa memungkinkan desa untuk menangani anggaran secara mandiri, sehingga meningkatkan efektivitas dan transparansi. Hasil ini juga didukung dengan peningkatan skor otonomi daerah dari 1.2 (2020) menjadi 1.8 (2024), yang terkait dengan meningkatnya penyerapan anggaran dari 74% menjadi 88%.

Pengaruh Efektivitas Pembangunan terhadap Kualitas Anggaran

Variabel Efektivitas Pembangunan (X₂) adalah 0.22 dengan signifikansi nilai sebesar 0.021 (< 0.05), yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan efektivitas pembangunan sebesar 1% akan meningkatkan kualitas anggaran sebesar 0.22%. Data tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pembangunan sudah mencapai 93% pada tahun 2023, yang berbanding lurus terhadap penyerapan anggaran 90%. Hal ini menunjukkan bahwa program pembangunan yang sesuai rencana dan tepat waktu mendorong penggunaan anggaran yang maksimal, sebagaimana ditegaskan oleh Mardiasmo (2018).

Pengaruh Simultan Otonomi Daerah dan Efektivitas Pembangunan

Hasil uji ANOVA (F = 15.02; p-value = 0.012) dan Adjusted R² (82.6%) menunjukkan bahwa kedua variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas anggaran. Artinya, kombinasi kewenangan otonomi dan pelaksanaan program yang efektif mampu meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi anggaran desa di Cibodasari. Temuan ini memperkuat penelitian Sihombing (2020) dan Sulistiyowati (2021) tentang pentingnya kapasitas SDM dan pengawasan internal dalam mendukung otonomi daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN**Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian tentang “*Pengaruh Otonomi Daerah dan Efektivitas Pembangunan terhadap Kualitas Anggaran Desa di Cibodasari Kota Tangerang Tahun 2020-2024*”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Otonomi Daerah terhadap Kualitas Anggaran (H₁)

Nilai koefisien regresi sebesar 6.25 dan nilai signifikansi 0.017 (< 0,05) membuktikan bahwa otonomi daerah berdampak signifikan dan positif terhadap kualitas anggaran desa. Peningkatan skor otonomi dari 1,2 pada tahun 2020 menjadi 1,8 ditahun 2024 berkorelasi dengan kenaikan penyerapan anggaran dari 74% menjadi 88%. Dengan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pelaksanaan otonomi daerah, maka semakin baik pula kualitas anggaran desa.

2. Pengaruh Efektivitas Pembangunan terhadap Kualitas Anggaran (H_2)

Efektivitas pembangunan juga berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas anggaran desa, dengan nilai koefisien regresi 0,22 dan nilai signifikansi 0,021 ($< 0,05$). Efektivitas pembangunan yang meningkat dari 70% ke 93% turut mendorong peningkatan penyerapan anggaran. Dengan demikian pembangunan desa yang terlaksana sesuai rencana dan tepat waktu berkontribusi langsung terhadap optimalisasi penggunaan anggaran.

3. Pengaruh Simultan Otonomi Daerah dan Efektivitas Pembangunan terhadap Kualitas Anggaran (H_3)

Hasil uji menunjukkan bahwa otonomi daerah dan efektivitas pembangunan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas anggaran desa. Nilai F 15,02 dan nilai p sebesar 0,012 ($< 0,05$) memberikan gambaran bahwa kedua variabel tersebut dapat menjelaskan 82,6% variasi kualitas anggaran secara simultan. Selain itu, nilai R^2 yang disesuaikan sebesar 0,826.

Meskipun pengaruh otonomi daerah dan efektivitas pembangunan terhadap kualitas anggaran termasuk kuat, penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan tersebut masih menghadapi tantangan. Diantaranya adalah regulasi yang tidak konsisten dan kemampuan SDM perangkat desa yang masih terbatas. Maka dari itu perlu dilakukan upaya penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi perangkat desa, serta penyederhanaan regulasi untuk memaksimalkan dampak positif atas kebijakan otonomi daerah.

Saran**1. Bagi Pemerintah Desa Cibodasari:**

- Meningkatkan pelatihan bagi perangkat desa dalam perencanaan dan pengawasan anggaran.
- Memperkuat transparansi melalui pelaporan keuangan yang akurat dan aksesibel bagi masyarakat.

2. Bagi Pemerintah Kota Tangerang :

- Menyederhanakan regulasi pengelolaan dana desa untuk mengurangi kebingungan aparat.
- Memperluas pendampingan teknis dan evaluasi berkala terhadap realisasi anggaran desa.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya:

- Meneliti faktor lain seperti partisipasi masyarakat atau dampak digitalisasi pada kualitas anggaran.
- Menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali persepsi stakeholders secara mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2019). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Erlangga
- Lestari, R., & Maulana, M. (2020). Pengaruh Kapasitas SDM terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(3), 109-118.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Oktari, V., & Nur, S. A. . (2024). Effectiveness of Strategic Performance and the Impact of Balanced Scorecard on DKI Jakarta Government Achievements. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2), 903-910. <https://doi.org/10.53494/jira.v10i2.663>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sari, L. M. (2018). Pengelolaan keuangan desa berbasis transparansi dan partisipasi masyarakat. *Jurnal Akuntansi Desa*, 3(1), 32-44.

- Sihombing,R (2020). Implementasi otonomi daerah terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 221-225.
- Smith, B. C. (2008). *Understanding third world politics: Theories of political change and development* (3rd ed.). Palgrave Macmillan.
- Sulistiyowati, D. (2021). Pengaruh perubahan regulasi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Provinsi Banten. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 9(1), 70-85.
- Sutedi, A. (2015). *Hukum otonomi daerah*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.